

DIGITALISASI DESA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI DAN MEWUJUDKAN KEBUMEN SMART VILLAGE

Aditya Dwi Putro¹, Umami Athiyah², Siti Khomsah³, Novanda Alim Setya Nugraha⁴, Sausan⁵
Program Studi Teknik Informatika, Institut Teknologi Telkom Purwokerto^{1,4} Program Studi
Sains Data, Institut Teknologi Telkom Purwokerto^{2,3,5}

aditya@ittelkom-pwt.ac.id, ummi@ittelkom-pwt.ac.id, siti@ittelkom-pwt.ac.id,
novanda@ittelkom-pwt.ac.id, 21110027@ittelkom-pwt.ac.id

Abstract

Villages are the most accurate data source for searching population data. For this reason, the method of collecting population data, filling in data in formats, processing data and presenting population data information to the public must be carried out effectively and efficiently so that the information can be conveyed quickly and accurately. This activity was carried out in 3 stages, namely survey; implementation of activities; and evaluation of activities. The survey was conducted in several villages in Kebumen Regency. The team assisted in re-arranging the Village website username and password at the Kebumen Regency Communication and Information Hall. In this activity, activities were also carried out to update plugins and main information for administration services on the village website. With the theme Village Digitalization to Improve the Quality of Information Services and realize Kebumen Smart, this activity aims to change the management process and administrative services in the Village to be of better quality and make information about Villages in Kebumen Regency easier to find by the wider community by updating contacts and website pages. , apart from that this activity will run on a scheduled basis for ongoing monitoring and evaluation. This also functions to publish information related to Village Programs, BUMDES, UMKM and the potential that exists in the Village.

Keywords: Digitalization; Village Information Services; Smart Village

Abstrak

Desa merupakan sumber data paling akurat untuk pencarian data kependudukan. Untuk itu, cara pengumpulan data penduduk, pengisian data dalam format, pengolahan data hingga penyajian informasi data kependudukan kepada masyarakat harus dilakukan secara efektif dan efisien agar informasi yang tersampaikan dapat dengan cepat dan akurat. Kegiatan ini dilakukan dalam 3 tahapan yakni survei; implementasi kegiatan; dan evaluasi kegiatan. survei di lakukan di beberapa desa yang berada di Kabupaten Kebumen. Tim melakukan pendampingan pengurusan kembali username dan password website Desa di Balai Kominfo Kabupaten Kebumen. Dalam kegiatan ini juga dilakukan kegiatan memperbaharui Plugin dan Informasi utama untuk layanan administrasi pada website desa. Dengan tema Digitalisasi Desa untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi dan mewujudkan Kebumen Smart kegiatan ini memiliki tujuan mengubah proses pengurusan dan layanan administrasi di Desa menjadi lebih baik kualitasnya dan informasi tentang Desa yang berada di Kabupaten Kebumen lebih mudah dicari oleh masyarakat luas dengan memperbaharui kontak dan laman website, terlepas dari itu kegiatan ini akan berjalan secara terjadwal untuk monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Hal ini juga berfungsi untuk mempublikasikan Informasi yang berkaitan dengan Program Desa, BUMDES, UMKM dan potensi-potensi yang ada di Desa.

Kata Kunci: Digitalisasi; Layanan Informasi Desa; Smart Village

1. PENDAHULUAN (Introduction)

Sebagai negara kesejahteraan, rakyat berharap pada pemerintah agar dapat terselenggaranya *good governance*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Efektif artinya penyelenggaraan tepat sasaran sesuai dengan perencanaan strategis yang ditetapkan, efisien artinya penyelenggaraan dilakukan secara hemat berdaya guna dan berhasil guna, transparan artinya segala kebijakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara itu adalah terbuka, semua orang melakukan dapat pengawasan secara langsung sehingga mereka dapat memberikan penilaian kinerjanya terhadap hasil yang dicapai, akuntabel artinya penyelenggara pemerintah bertanggung jawab

terhadap kebijakan yang ditetapkan, serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada seluruh warga negara pada setiap akhir tahun penyelenggaraan pemerintahan (Neneng Siti Maryam, 2016).

Pelayanan publik menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan pengukuran kinerja pemerintah melalui birokrasi. Pelayanan publik sebagai penggerak utama juga dianggap penting oleh semua aktor dari unsur *good governance*. Subarsono mendefinisikan pelayanan publik sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna (Alwi Hashim Batubara, 2015). Fenomena pelayanan publik oleh birokrasi pemerintah sarat dengan permasalahan, misalnya prosedur pelayanan yang berbelit-belit, ketidakpastian waktu dan harga yang menyebabkan pelayanan menjadi sulit dijangkau secara wajar oleh masyarakat. Hal ini menyebabkan terjadi ketidakpercayaan kepada pemberi pelayanan dalam hal ini birokrasi sehingga masyarakat mencari jalan alternatif untuk mendapatkan pelayanan melalui cara tertentu yaitu dengan memberikan biaya tambahan (Neneng Siti Maryam, 2016).

Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan upaya perbaikan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang berkesinambungan demi mewujudkan pelayanan publik yang prima sebab pelayanan publik merupakan fungsi utama pemerintah yang diberikan sebaik-baiknya oleh pejabat publik. Salah satu upaya pemerintah adalah dengan melakukan penerapan program digitalisasi desa (Lailiyah, 2022). Digitalisasi dapat diartikan sebagai sebuah proses menyimpan seluruh sifat dan informasi dari teks, suara, gambar, atau multimedia dalam sebuah string elektronik dari nol dan satu bit (Wuryanta, 2004). Desa adalah sumber data paling akurat untuk pencarian data kependudukan. Untuk itu, cara pengumpulan data penduduk, pengisian data dalam format, pengolahan data hingga penyajian informasi data kependudukan kepada masyarakat harus dilakukan secara efektif dan efisien agar informasi yang tersampaikan dapat dengan cepat dan akurat. Masyarakat desa sangat mengharapkan adanya digitalisasi pelayanan dan informasi kependudukan (Ardhana, 2019).

Digitalisasi dapat diartikan sebagai sebuah proses menyimpan seluruh sifat dan informasi dari teks, suara, gambar, atau multimedia dalam sebuah string elektronik dari nol dan satu bit (Wuryanta, 2004). Digitalisasi memungkinkan merubah segala sesuatu menjadi bentuk yang bisa disimpan di berbagai media digital, seperti compact disc, hard disc, serta flash disc, dan bisa ditransfer ke berbagai tempat di seluruh dunia dengan hanya memakan waktu yang sangat singkat melalui jaringan telekomunikasi yang berupa internet (Arifin et al., 2020). Kehadiran internet yang telah mencapai hampir keseluruhan wilayah Indonesia, telah berdampak pada kehidupan masyarakat.

Melalui internet masyarakat dapat bertukar informasi tanpa harus bertatap muka (Imaniawan & Wati, 2017). Penggunaan sistem informasi untuk membantu kinerja pemerintah desa menjadi lebih baik, lebih efisien dan lebih mudah. Dengan didukung oleh kemajuan teknologi informasi yang memungkinkan pengembangan sistem informasi semakin handal (Pardani & Damayanthi, 2017; Paryanta et al., 2017).

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat kegiatan digitalisasi berkaitan erat dengan proses menyimpan dan mentransfer informasi secara elektronik melalui media komputer, tanpa mengenal batasan waktu dan tempat. Setiap informasi dapat dengan relatif mudah dan cepat untuk disimpan serta ditransfer ke berbagai tempat di belahan dunia (Wijaya et al., 2013). Hal inilah yang kemudian menjadi potensi yang luar biasa dari media internet. Kegiatan digitalisasi

administrasi desa dilakukan dengan tahapan survei atau inventarisasi kondisi digitalisasi yang sudah dilakukan oleh perangkat desa, perumusan masalah, dan upaya pemecahan masalah.

Berbicara mengenai administrasi dan informasi di Desa Karanggayam masih kurang memadai yang ditunjukkan oleh beberapa fakta di lapang antara lain perangkat komputer yang ada di balai Desa Putat Lor masih menggunakan CPU lama dan windows XP serta *website* dari pada Desa Karanggayam hanya tercantum nama dan alamat Desa Karanggayam berada di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen tanpa ada keterangan informasi yang lebih detail. Menurut Dika Agnes, S.E. staf pengelola *website* desa karanggayam menmaparkan bahwa *website* desa yang disediakan oleh KOMINFO juga belum ada ketersediaan data seperti data penduduk, serta tidak dapat menghapus data secara masal harus satu-persatu, permasalahan lain yaitu data yang dikumpulkan dari masing-masing dusun tidak dapat kolektif dan tidak dapat dikumpulkan secara cepat karena kepala dusun belum bisa menggerakkan RT setempat untuk melakukan input data. Kendala lain yang dialami oleh pengelola *website* yaitu mereka belum pernah mengikuti pelatihan mengenai cara mengelola *website*, serta pendidikan mereka bukan dari bidang IT sehingga dalam mengelola *website* dilakukan secara otodidak, para pengelola juga merasa kesulitan dalam mengisi konten *website*. Oleh karena itu, Tim LPPM Institut Teknologi Telkom Purwokerto tahun 2023 mengangkat tema Digitalisasi Desa sebagai program kelompok. Program ini secara umum bertujuan agar proses pengurusan dan layanan administrasi di Desa Karanggayam lebih baik kualitasnya dan informasi tentang Karanggayam lebih mudah dicari oleh masyarakat luas.

2. TINJAUAN LITERATUR (*Literature Review*)

Website desa memberikan aksesibilitas informasi yang lebih baik kepada penduduk desa. Informasi tentang program pemerintah, layanan kesehatan, pendidikan, acara desa, dan berbagai layanan publik lainnya dapat diakses dengan mudah oleh warga desa melalui internet (Tirayoh & Waworundeng, 2023). *Website* desa juga dapat menyediakan platform bagi warga desa untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan memberikan masukan. Melalui forum diskusi *online* atau survei daring, mendorong masyarakat untuk dapat menyuarakan pendapat mereka tentang isu-isu desa (Rachmawati et al., 2018).

Tinjauan Umum Tentang Pelayanan Publik Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinikan pelayanan publik sebagai berikut: “Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik” Salah satu tugas pokok terpenting pemerintah adalah memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Pelayanan publik merupakan pemberian jasa oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah, ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat. Mengutip pendapat Dwiyanto (2005) ada beberapa pertimbangan mengapa pelayanan publik menjadi titik strategis untuk memulai pengembangan *good governance* di Indonesia, antara lain : (1) Dengan pelayanan publik nilai-nilai yang mencirikan *good governance* dapat dilakukan secara lebih mudah dan nyata oleh birokrasi pemerintah. Nilai-nilai yang mencirikan praktik *good governance* seperti efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dapat diterjemahkan secara relatif mudah dalam penyelenggaraan pelayanan publik daripada melembagakan nilai-nilai tersebut dalam keseluruhan aspek kegiatan pemerintahan; (2) Pelayanan publik melibatkan kepentingan

semua unsur *governance*. Pemerintah, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar memiliki kepentingan dan keterlibatan yang tinggi dalam ranah ini. Pelayanan publik memiliki high stake dan menjadi pertaruhan yang penting bagi ketiga unsur *governance* tersebut karena baik dan buruknya praktik pelayanan publik sangat berpengaruh kepada ketiganya. Nasib sebuah pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, akan sangat dipengaruhi oleh keberhasilan mereka dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik. Keberhasilan sebuah rezim dan penguasa dalam membangun legitimasi kekuasaan sering dipengaruhi oleh kemampuan mereka dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang baik dan memuaskan warga. Demikian pula dengan membaiknya pelayanan publik juga akan memperkecil biaya birokrasi, yang pada gilirannya dapat memperbaiki kesejahteraan warga pengguna dan efisiensi mekanisme pasar. Dengan demikian, reformasi pelayanan publik akan memperoleh dukungan yang luas; (3) Pelayanan publik mampu membangkitkan dukungan dan kepercayaan masyarakat. Pelayanan publik selama ini menjadi ranah dimana Negara yang diwakili oleh pemerintah berintegrasi dengan lembaga-lembaga non pemerintah. Dalam ranah ini terjadi pergumulan yang sangat intensif antara pemerintah dengan warganya. Buruknya praktik *governance* dalam penyelenggaraan pelayanan publik sangat dirasakan oleh warga dan masyarakat luas. Ini berarti jika terjadi perubahan yang signifikan pada ranah pelayanan publik dengan sendirinya dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh warga dan masyarakat luas. Keberhasilan dalam mewujudkan praktik *good governance* dalam ranah pelayanan publik mampu membangkitkan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat luas bahwa membangun *good governance* bukan hanya sebuah mitos tetapi dapat menjadi suatu kenyataan; (4) Dengan memperbaiki pelayanan publik toleransi terhadap praktik *bad governance* diharapkan dapat dihentikan. Hasil *Governance and Decentralization Survei 2002* (GDS 2002) menunjukkan bahwa sebagian besar warga menganggap wajar terhadap praktik pungutan liar (pungli) dan justru merasa lega karena proses pelayanan dapat segera selesai, menjadi indikator bahwa warga bangsa menjadi semakin toleran terhadap praktik *bad governance*. Hal ini tentu tidak saja dapat mendorong warga untuk mengembangkan mekanisme survival dengan adanya praktik *bad governance*, tetapi juga menghindari upaya untuk membangun *good governance*

3. METODE PELAKSANAAN (*Materials and Method*)

Kegiatan ini dilakukan dalam 3 tahapan yakni survei, implementasi kegiatan dan evaluasi kegiatan. survei dilakukan di Balai Desa Karanggayam, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen dengan melakukan silaturahmi kepada seluruh Perangkat Desa Karanggayam yang akan di ambil datanya untuk keperluan keabsahan data.



Gambar 1. Survei *Software* Perangkat Komputer Balai Desa dan *Website* Desa

Dalam langkah ini dilakukan analisa tentang potensi implementasi digitalisasi desa di Karanggayam. Tim LPPM Institut Teknologi Telkom Purwokerto wawancara terkait optimalisasi penggunaan perangkat lunak untuk layanan masyarakat di desa Karanggayam, serta optimalisasi penggunaan *website* di desa. Setelah survei dilakukan kegiatan implementasi berupa *updating* program atau *software* layanan administrasi desa yakni pembaharuan *software* berupa Microsoft Office, Microsoft Power Point, Microsoft Excel dan upaya untuk memperbaharui *website* desa dengan mencantumkan profil, luas wilayah, letak geografis, sejarah, tingkat perekonomian, jumlah penduduk, dan potensi yang ada di Desa Karanggayam, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN (*Results and Discussion*)

Dari hasil survei diketahui bahwa secara umum layanan terhadap kegiatan kemasyarakatan sudah dilakukan dengan perangkat lunak yang ada terutama Microsoft Word dan Microsoft Excel, namun untuk *website* desa saat ini tidak bisa diakses atau diperbaharui tampilannya karena username dan passwordnya tidak lagi diketahui. Untuk itu tim melakukan pendampingan pengurusan kembali username dan password *website* Desa Karanggayam dan hingga kegiatan pendampingan Tim LPPM Institut Teknologi Telkom selesai dilakukan proses pengurusan masih berjalan. Dalam kegiatan ini juga dilakukan kegiatan memperbaharui *software-software* utama untuk layanan administrasi desa seperti Microsoft Office, Microsoft Power Point, Microsoft Excel.



Gambar 2. Pendampingan Pengelolaan *Website* Desa dan Peningkatan *Software* Komputer Balai Desa

Dari hasil observasi juga diketahui bahwa masyarakat Desa Karanggayam sangat membutuhkan digitalisasi desa. Maka dari hasil pelaksanaan kegiatan “Digitalisasi Desa” kami mampu mendorong masyarakat dan perangkat desa yang sebelumnya jarang sekali mengetahui informasi tentang desa mereka sendiri maupun kurang tahunya tentang *software* terbaru yang dapat membantu dalam sistem administrasi desa. Setelah kami melakukan program kerja yang telah disetujui oleh masyarakat dan perangkat Desa Karanggayam, sampai saat ini masyarakat dan perangkat desa sudah mulai mengetahui akan hal-hal tersebut.

Dan juga agar masyarakat secara luas dapat mengakses informasi mengenai Desa Karanggayam melalui internet maka Tim LPPM Institut Teknologi Telkom Purwokerto

melakukan update informasi pada *website* Wikipedia Desa Karanggayam. Disini kami telah mencantumkan profil, luas wilayah, letak geografis, sejarah, tingkat perekonomian, jumlah penduduk, dan potensi yang ada di Desa Putat Lor sehingga masyarakat dan juga perangkat Desa Karanggayam akan lebih mudah jika ingin mengetahui informasi tentang desa.



Gambar 3. Menunjukkan Hasil *Website* kepada Perangkat Desa

Setelah kami dari tim LPPM Institut Teknologi Telkom Purwokerto menyelesaikan program kerja, secara umum respon perangkat desa terhadap kegiatan ini cukup baik dan cukup puas. Meskipun saat awal menggunakan *software* microsoft yang baru dan *Login* ke Dashboard *Website* masih sedikit bingung dengan cara kerjanya tetapi kami telah memberikan penyuluhan bagaimana cara kerja microsoft yang baru dan mengelola *website* desa.



Gambar 4. Pelatihan Pengelolaan *Website* kepada Perangkat Desa di Balai Kominfo Kabupaten Kebumen

Kemudian untuk pembaharuan *website*, perangkat desa maupun masyarakat umum memberikan respon cukup puas, karena adanya *website* ini masyarakat umum pun juga bisa mengetahui tentang profil Desa Karanggayam dengan beserta potensi-potensinya. Harapannya

kegiatan seperti ini dapat terus dilanjutkan sehingga keinginan untuk mewujudkan kemajuan Desa Karanggayam yang informatif dan memiliki layanan digital berkualitas dapat diwujudkan.

5. KESIMPULAN (*Conclusions*)

Dari kegiatan yang telah tim LPPM Institut Teknologi Telkom Purwokerto laksanakan terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut : (1) Perangkat lunak antara lain Microsoft Office, Microsoft Power Point, Microsoft Excel dengan versi terbaru sangat penting terutama untuk layanan administrasi Desa Karanggayam; (2) Pengaksesan dan pembaharuan *website* yang mencantumkan profil, luas wilayah, letak geografis, sejarah, tingkat perekonomian, jumlah penduduk, dan potensi yang ada di Desa Karanggayam sangat diperlukan guna untuk memudahkan masyarakat yang ingin mengetahui mengenai Desa Karanggayam; (3) Dengan tema Digitalisasi Desa untuk Meningkatkan Kualitas Layanan dan Informasi Desa Karanggayam sebagai program kerja dari tim LPPM Institut Teknologi Telkom Purwokerto tahun 2023 yang memiliki tujuan mengubah proses pengurusan dan layanan administrasi di Desa Karanggayam menjadi lebih baik kualitasnya dan informasi tentang Desa Karanggayam lebih mudah dicari oleh masyarakat luas dengan memperbaharui perangkat lunak/*software* dan mengakseskan situs *website* khusus untuk memaparkan Desa Karanggayam dan potensi-potensinya.

6. UCAPAN TERIMA KASIH (*Acknowledgement*)

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Institut Teknologi Telkom Purwokerto yang memberikan kesempatan kepada Tim untuk melakukan kegiatan Pengabdian Masyarakat di Desa Karanggayam, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen.

7. DAFTAR PUSTAKA (*References*)

- Arifin, Z., Budi Wahono, B., Prihatmoko, D., & Riyoko, S. (2020). Inovasi Peningkatan Hasil Tangkapan Ikan Produk Unggulan Daerah oleh Nelayan Purse Seine Menggunakan Teknologi GPS. *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*, 3(1), 54–62.
<https://doi.org/10.33474/jipemas.v3i1.4779>
- Ardhana, V. Y. P. (2019). Website Based Village Population Data Information System Sistem Informasi Data Kependudukan Desa Berbasis Web. *SainsTech Innovation Journal*, 2(2), 1–5. <http://jkqh.uniqhba.ac.id/index.php/sij/article/view/99>
- Imaniawan, F. F. D., & Wati, F. F. (2017). Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Berbasis Web Pada Desa Bogangin Sumpiuh. *Indonesian Journal on Networking and Security*, 7(3), 1–9. <https://doi.org/10.2311/ijns.v7i3.1516>
- Lailiyah, K. (2022). Digitalisasi Desa Sebagai Upaya Percepatan Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Good Governance. *RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi Dan Teknologi Kabupaten Batang*, 6(2), 26–34. <https://doi.org/10.55686/ristek.v6i2.112>
- Pardani, K. K., & Damayanthi, I. G. A. E. (2017). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi, Partisipasi Pemakai, Manajemen Puncak Dan Kemampuan Pemakai Terhadap Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi. *E-Jurnal Akuntansi*, 19(3), 2234–2261. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/29964>

- Paryanta, Sutariyani, & Susilowati, D. (2017). Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Berbasis Web Desa Sawahan. *IJSE -Indonesian Journal on Software Engineering*, 3(2), 77–81. <https://doi.org/10.31294/ijse.v3i2.2980>
- Rachmawati, R., Nurdin, M., & Uguy, L. S. (2018). *Sangatta Selatan Membangun: Desa Percontohan Pembangunan Berbasis ICT*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPPG).
- Tirayoh, G. A. T., & Waworundeng, W. (2023). Implementasi Kebijakan Program Desa Digital Dalam Upaya Kemajuan Pelayanan Publik Di Desa Kauditan I Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara. *Governance*, 3(1), 1–11. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/48052>
- Wijaya, E., Anggraeni, R., & Bachri, R. (2013). Desa Digital: Peluang untuk Mengoptimalkan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(1), 75–88. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.1.158>
- Wuryanta, A. E. W. (2004). Digitalisasi Masyarakat: Menilik Kekuatan dan Kelemahan Dinamika Era Informasi Digital dan Masyarakat Informasi. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(2), 131–142. <https://doi.org/10.24002/jik.v1i2.163>